

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa-analisa dan pengamatan pada kondisi yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dari faktor-faktor asumsi ekonomi makro dapat disimpulkan asumsi ekonomi makro yang paling menimbulkan risiko fiskal
 - a. Tekanan fiskal yang disebabkan oleh asumsi pertumbuhan ekonomi memberi tekanan pada struktur pendapatan dan belanja negara. Pada Pendapatan negara hanya pada tahun 2008 penerimaan negara dari perpajakan dapat mencapai target dengan tingkat realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen penerimaan pajak yang berhasil diterima oleh pemerintah yaitu sebesar 658,7 triliun rupiah dengan proporsi Pajak Penghasilan sebesar 327,5 triliun dan PPN 209,6 triliun rupiah. Namun, untuk tahun 2009 s.d. 2013 penerimaan dari pajak tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk belanja negara, pertumbuhan ekonomi antara lain mempengaruhi besaran nilai dana perimbangan dalam anggaran transfer ke daerah sebagai akibat perubahan pada penerimaan pajak.
 - b. Tekanan fiskal yang disebabkan oleh asumsi nilai tukar rupiah memberi tekanan pada struktur pendapatan dan belanja negara. Berfluktuasinya nilai

tukar rupiah terhadap mata uang asing atau dollar akan menimbulkan risiko fiskal bagi perekonomian di Indonesia. Karena depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat memiliki dampak pada sisi APBN, baik pada pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan negara. Pada sisi pendapatan negara, depresiasi nilai tukar rupiah akan mempengaruhi penerimaan minyak bumi dan gas bumi (migas), PPh migas dan PPN. Nilai tukar rupiah juga mempengaruhi struktur belanja pemerintah pusat dari sisi belanja subsidi energi yang terdiri dari subsidi BBM dan subsidi listrik.

- c. Tekanan fiskal yang disebabkan oleh asumsi inflasi yang terbesar terjadi pada tahun 2008 dengan tingkat laju inflasi sebesar 11,1 persen. Tingginya tingkat inflasi ini disebabkan adanya krisis keuangan dunia yang mengakibatkan terjadinya gejolak pada harga-harga komoditi di pasar global yang membawa tekanan pada harga-harga barang domestik di Indonesia. Tingginya tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia berdampak pada pendapatan dan belanja negara. Pada struktur pendapatan negara tingginya tingkat inflasi akan mempengaruhi PPh terutama PPh nonmigas. yang pada tahun 2008 dengan tingkat inflasi tertinggi di antara tahun-tahun lainnya sebesar 11,1 persen yang mengakibatkan penerimaan negara dari pajak PPh Nonmigas berada pada jumlah terendah dibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya yaitu sebesar Rp 250,5 triliun. Sedangkan pada struktur belanja negara tingginya inflasi yang terjadi di Indonesia akan menambah besaran total belanja negara yang diakibatkan naiknya harga-harga barang secara umum.

- d. Tekanan fiskal yang disebabkan oleh asumsi harga minyak mentah Indonesia memberi tekanan pada struktur pendapatan dan belanja negara. ICP berpengaruh pada PNBP Migas dan PPh Migas. Dari sisi penerimaan negara dari PNBP Migas dan PPh Migas kenaikan harga minyak mentah Indonesia memberikan dampak positif bagi ABPN Indonesia karena penerimaan negara yang berasal dari PNBP dan PPh Migas dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan dan meningkat setiap tahunnya. Dari sisi belanja negara, saat harga minyak mentah pada tahun 2008 berada pada harga 97 USD/barel dan adanya krisis keuangan global mengakibatkan realisasi subsidi energi Indonesia Rp 223 triliun lebih besar dibandingkan dengan target hanya sebesar Rp 187,1 triliun. Dan pada tahun 2011 harga minyak mentah Indonesia mengalami kenaikan tertinggi yaitu berada pada harga 115 USD/barel. Dengan tingginya harga minyak mentah Indonesia ini berakibat juga pada subsidi energi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah yaitu melebihi target sebesar Rp 255,6 triliun. Subsidi energi yang membengkak juga terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp 299,9 triliun seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia (mekanisme pasar) dan besaran nilai tukar rupiah yang mempengaruhi besaran harga minyak Indonesia.

B. SARAN

1. Pemerintah perlu membuat kebijakan fiskal yang dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga keadaan ekonomi semakin membaik, menstabilkan harga-harga umum yang mengalami lonjakan kenaikan. Selain itu, dalam pengelolaan penerimaan negara perlu mendapat perhatian dari pemerintah sehingga pemerintah dapat menggali sumber-sumber penerimaan yang potensial baik dari pendapatan negara yang berasal dari perpajakan maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
2. Dalam pengalokasian anggaran untuk belanja negara, pemerintah perlu lebih lagi mengefisiensikan alokasi anggaran tersebut untuk belanja yang lebih bermanfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.